

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: Citra Aditya Abadi.

Brotodirejo, S. (1989). *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung: Sespimpol.

Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

G.Sorensen. (2003). *Demokrasi dan demokratisasi*. yogyakarta: pustaka pelajar.

Ilyas, A. A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* . Yogyakarta: Gama Media.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cita.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Pfeiffer, S. (2004). *Vote Buying and Its Implication For Democracy : Evidence From Latin America. TI Global Report*.

Prakoso, J. (1987). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikun, B. d. (2003). *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.

Supriyanto, T. S. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal :

Afifah, W. (Edisi Januari-Juni 2014). *Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 1*.

Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol.3 No.2*.

Bachri, M. A. (2013). Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. *Jurnal IUS Vol. 1 No. 2*.

Ediwarman. (2012). Paradoks Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.8 No.1*.

Ficry Abrar Pratama Ediwarman, M. M. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi. *USU Law-Journal Vol.5 No.2*.

Qamar, H. D. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Pandecta Vol.13 No.1*.

Rian, S. (2018). Eksistensi Polri Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019. *Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang Vol.4 No.2*.

Sacipto, R. (2018). Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 4., No, 2*.

Tajaripa, K. (2013). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Vol.1*.

Witianti, R. S. (2017). Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1*.

#### **Kamus :**

Poerwadarminta, W. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S.Poerwadarminta. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

#### **Internet :**

Firmantoro, Z. A. (2016). Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta . *Tesis Magister Fakultas Hukum UII*. Retrieved Februari 10, 2019, from [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9058/TESIS\\_ZUHAD%20AJI%20FIRMAN\\_TORO\\_13912001.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9058/TESIS_ZUHAD%20AJI%20FIRMAN_TORO_13912001.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Hapsari, A. (2019, Februari 5). *Pidana Pemilu Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Divonis Percobaan*. Retrieved Februari 13, 2019, from Suara Merdeka News : :

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/165401/pidana-pemilu-wakil-ketua-dprd-gunungkidul-divonis-percobaan>

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. (2008). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Hasil Kajian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Dengan Dukungan Yayasan TIFA*. Retrieved Februari 9, 2019, from <http://worldcat.org/identities/lccn-n97904797/>

Lembar Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Retrieved Desember 11, 2018, from Database Peraturan: <http://ngada.org/uu10-2008bt.htm>

Lembaran Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Retrieved Desember 11, 2018, from [bkpm.go.id: https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/UU\\_2\\_2002.pdf](https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf)

#### **Dokumen :**

Rekap Data laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.

Hasil Pengawasan Bawaslu DIY Yang Tertuang Dalam Form A2 Tertanggal 18 Maret 2014 Dan Form Model B-2 DD No.01/TM/PILEG/III/2014 Tertanggal 21 Maret 2014

Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu DIY Yang Tertuang Dalam Form Model SG-3 Tanggal 20 Maret 2014

Data Sat Reskrim Polres Sleman Pada Tanggal 11 Februari 2019

Laporan Polisi No:LP/85/XII/2018/DIY/Sleman Tanggal 26 Desember 2018